

LAPORAN SPIP

SEMESTER I



**BALAI PENGUJIAN KESEHATAN
IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG**

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Semester I Tahun 2025 Lingkup Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (BPKIL) Serang dapat diselesaikan.

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan SPIP Semester I Tahun 2025 lingkup BPKIL Serang berisi tentang penyelenggaraan SPIP, hambatan dalam pelaksanaan, rencana pemecahan masalah dan tindak lanjut pemecahan masalah yang diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen, karena semua risiko yang dapat menghambat proses organisasi/unit kerja telah diidentifikasi dan dianalisis.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan keterlibatan dalam penyusunan laporan ini. Berbagai masukan dan saran terbuka untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Serang, 15 Juli 2025
Kepala Balai Pengujian Kesehatan
Ikan dan Lingkungan Serang



Fahri T. W. Badi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN SPIP	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Ruang Lingkup	3
BAB II PENYELENGGARAAN SPIP	4
2.1. Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan BPKIL Serang.....	4
2.2. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) SPIP BPKIL Serang	5
2.3. Ringkasan Pelaksanaan SPIP Lingkup BPKIL Serang	5
BAB III PELAKSANAAN PENGENDALIAN SPIP DI BPKIL SERANG.....	7
3.1. Pengendalian Rutin.....	7
3.2. Pengendalian Berkala	14
3.3. Pengendalian dengan Manajemen Risiko.....	15
3.4. Hambatan.....	15
3.5. Rencana Pemecahan Masalah.....	16
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	17
4.1. Kesimpulan	17
4.2. Saran	17
LAMPIRAN	18

BAB I

GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN SPIP

1.1. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), merupakan salah satu cara yang telah ditempuh oleh pemerintah dalam merumuskan metoda guna memperbaiki system pengendalian intern agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan dapat dijalankan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pembangunan budaya pengendalian internal (*internal control culture*). Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KKP, yang menjadikan manajemen resiko sebagai bagian dalam penyelenggaraan SPIP.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Jadi SPIP adalah system pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Mengingat pentingnya tujuan pengendalian tersebut setiap pimpinan dan pegawai di Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (BPKIL) Serang perlu meningkatkan penerapan pengendalian intern dan wajib menyelenggarakan SPIP secara sistematis, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government* dan *good governance*) dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, seluruh pegawai wajib menyelenggarakan SPIP secara tertib, terkendali, serta efektif dan efisien di lingkungan kerjanya masing-masing.

Penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Kelautan dan Perikanan diintegrasikan pada semua kegiatan yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban sampai dengan pemanfaatan yang dilaksanakan melalui kegiatan pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko.

Pengawasan intern diperlukan untuk memberikan peringatan dini, meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja BPKIL Serang, diperlukannya sistem pengendalian yang meliputi 5 (lima) unsur yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian internal.

Tolok ukur efektivitas penyelenggaraan SPIP di BPKIL Serang adalah sekurang-kurangnya tidak ada hambatan yang mengganggu pencapaian tujuan organisasi; tidak menghambat keandalan pertanggungjawaban keuangan satuan kerja; tidak menghambat pengelolaan asset termasuk pemanfaatannya di satuan kerja; tidak menghambat jalannya dan pencapaian tujuan program, kegiatan, dan output; tidak menghambat terwujudnya pelayanan publik yang efektif dan efisien; serta tidak menghambat pemenuhan hak dan kewajiban pegawai.

1.2. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
- e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- f. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- g. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- h. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;
- i. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- k. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2008, tentang Kementerian Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

- m. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 172 tahun 2014; serta Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.
- n. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- o. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014–2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- q. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
- r. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- s. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.10/MEN/2016 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- t. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya;
- u. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/MEN-SJ/KP.430/VI/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrasi Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;
- v. Surat Tugas Kepala BPKIL Serang Nomor B.89/BPKIL/KP.440/I/2024 tanggal 8 Januari 2024 tentang Tim Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya laporan penyelenggaraan SPIP Semester I Tahun 2025 adalah untuk memberikan informasi bagi pimpinan dan seluruh pegawai dan sebagai sarana dalam pengambilan keputusan tentang pelaksanaan penyelenggaraan SPIP di Inspektorat Jenderal.

Tujuan disusunnya laporan penyelenggaraan SPIP Semester I Tahun 2025 lingkup BPKIL Serang adalah:

- a. Memberikan informasi pelaksanaan penyelenggaraan SPI BPKIL Serang, yang meliputi Pengendalian Rutin, Pengendalian Berkala, dan Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko;
- b. Mengidentifikasi hambatan yang ada dalam penyelenggaraan SPIP;
- c. Memberikan rencana pemecahan masalah;
- d. Memberikan informasi hasil tindak lanjut pemecahan masalah.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari laporan penyelenggaraan SPIP Semester I Tahun 2025 BPKIL Serang mencakup informasi pelaksanaan SPIP yang meliputi unsur Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi serta Pengendalian Intern pada periode Semester I Tahun 2025 di lingkungan BPKIL Serang.

BAB II

PENYELENGGARAAN SPIP

2.1. Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan BPKIL Serang

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 tahun 2016, bahwa Kepala Satuan Kerja pada kewenangan kantor pusat, kantor daerah, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan menyelenggarakan SPIP di lingkungan kerjanya bekerja sama dengan Tim SPIP. Dalam rangka menindaklanjuti amanat tersebut, BPKIL Serang telah membentuk Satuan Tugas SPIP BPKIL Serang sebagai mana dituangkan dalam Surat Tugas Kepala BPKIL Serang Nomor B.89/BPKIL/KP.440/I/2024 tanggal 8 Januari 2024 tentang Tim Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang. Penyelenggaraan SPIP menerapkan 5 unsur SPIP, diuraikan sebagai berikut:

- a. Lingkungan Pengendalian
- b. Penilaian Risiko
- c. Kegiatan Pengendalian
- d. Informasi dan Komunikasi
- e. Pengendalian Intern

Penyelenggaraan SPIP di BPKIL Serang meliputi :

a. Pemahaman

1) Pembinaan

Pembinaan Pelaksanaan kegiatan SPIP dapat dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, Satgas SPI Unit Eselon I dan jika diperlukan dengan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku instansi Pembina penyelenggara SPIP tingkat nasional. Adapun kegiatan pembinaan yang telah dilakukan antara lain:

- a) Sosialisasi pelaporan SPIP dengan Aplikasi SILASTRI lingkup DJPB pada tanggal 27 Februari 2025 oleh Biro Keuangan dan BMN KKP melalui zoom meeting berdasarkan undangan Nomor B.1470/DJPB.1/TU.330/II/2025 tanggal 24 Februari 2025.
- b) Sosialisasi MR KKN lingkup DJPB pada tanggal 22 Mei 2025 berdasarkan surat undangan Sesditjen Perikanan Budi Daya Nomor B.2795/DJPB.1/TU.330/V/2025 tanggal 15 Mei 2025.

2) Fokus Grup Diskusi (FGD)

Metoda lain untuk membangun kembali kesadaran, menyamakan persepsi dan penyegaran mengenai SPIP adalah dengan menyelenggarakan diskusi kelompok atau FGD. Satgas SPIP di lingkungan Kementerian/Satgas SPI Unit Eselon I/Tim SPI menjadi fasilitator dalam diskusi.

b. Pelaksanaan

1) Internalisasi,

Internalisasi adalah proses yang dilakukan oleh pimpinan dan pegawai untuk menerapkan SPI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari. Penerapan SPI dilaksanakan melalui penyelenggaraan pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko.

Telah dilakukan Internalisasi SPIP lingkup BPKIL Serang pada tanggal 05 Mei 2025 oleh Satgas SPIP BPKIL Serang.

- 2) Pendokumentasian
Pendokumentasian adalah proses dokumentasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pengendalian intern yang dilaksanakan melalui penyelenggaraan pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko.
- c. Pelaporan
Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan penyelenggaraan SPIP, maka Satgas SPI BPKIL Serang menyusun laporan per-semester yang memuat informasi-informasi :
 - 1) Ringkasan
 - 2) Pelaksanaan Kegiatan
 - 3) Hambatan
 - 4) Rencana Pemecahan Masalah
 - 5) Tindak Lanjut Pemecahan Masalah

2.2. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) SPIP BPKIL Serang

Tim Penyelenggara SPIP BPKIL Serang telah dibentuk melalui Surat Tugas Kepala BPKIL Serang Nomor B.89/BPKIL/KP.440/I/2024 tanggal 8 Januari 2024 tentang Tim Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang. Secara umum tugas Tim Penyelenggara SPIP BPKIL Serang adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja pelaksanaan SPIP di BPKIL Serang;
2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan SPIP di lingkungan BPKIL Serang;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko;
4. Membantu Kepala BPKIL Serang melakukan analisa untuk menetapkan rencana aktivitas/kegiatan yang perlu dilakukan pengendalian dengan pendekatan manajemen resiko, dan selanjutnya menyampaikan kepada Kepala BPKIL Serang untuk dilakukan tindakan pengendalian;
5. Melakukan inventarisasi terhadap resiko di BPKIL Serang yang memerlukan pengendalian pada tingkat kebijakan dan selanjutnya berkoordinasi dengan Kepala Satuan Kerja dan Satuan Tugas (Satgas) SPIP unit DJPB untuk mendistribusikan kepada para pimpinan di tingkat kebijakan;
6. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPIP di BPKIL Serang secara periodik;
7. Membuat laporan secara berkala setiap semester paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada semester berikutnya yang disampaikan kepada Kepala BPKIL Serang dan Satgas SPIP unit Direktorat jenderal Perikanan Budidaya.

2.3. Ringkasan Pelaksanaan SPIP Lingkup BPKIL Serang

Penyelenggaraan SPIP sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016, dengan melakukan pengendalian secara rutin dan berkala serta dengan pendekatan manajemen risiko. Rencana pelaksanaan SPIP dilingkungan BPKIL Serang Semester I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut :

Uraian Kegiatan	Pelaporan		Pengendalian	
	Bulanan	Semesteran	Rutin	Berkala
Organisasi	V		V	
Perencanaan	V		V	
Pelaksanaan Anggaran	V		V	
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	V		V	
Akuntansi dan Pelaporan		V	V	
Kerugian Negara		V	V	
Kepegawaian		V	V	
Kinerja		V	V	
SDM Pengelola Keuangan		V		V
Pengendalian Penyusunan Anggaran		V		V
Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa		V		V
Pengendalian Barang Milik Negara		V		V
Pengendalian Penyelesaian Kerugian Negara		V		V
Pengendalian Penyerapan Anggaran		V		V

BAB III

PELAKSANAAN PENGENDALIAN SPIP DI BPKIL SERANG

3.1. Pengendalian Rutin

Pengendalian rutin diselenggarakan oleh pimpinan dan seluruh pegawai setiap hari. Risiko yang perlu dikendalikan dalam penyelenggaraan pengendalian rutin antara lain dalam aspek organisasi, aspek perencanaan, aspek pengelolaan keuangan (pelaksanaan anggaran, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), akuntansi dan pelaporan, serta kerugian negara), aspek kepegawaian, dan aspek kinerja. Adapun Satker Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang pada Semester I Tahun 2025 telah melaksanakan pengendalian rutin sebagai berikut :

No	Kelompok/Uraian Risiko	Komentar/Catatan
A. Organisasi		
1.	Tujuan organisasi belum ditetapkan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan ada batas waktu	Telah ditetapkan renstra, Kebijakan Pengawasan, Penetapan IKU Tahun 2025 Serta Perjanjian Kinerja 2025 dan telah dilakukan Dialog kinerja dan penyusunan matrik peran hasil BPKIL Serang pada Tanggal 03 Maret 2025
2.	Pegawai tidak mengetahui dan memahami tujuan organisasi	1. Telah dilakukan breafing reformasi birokrasi tentang penciptaan lingkungan kerja yang professional pada tanggal 02 Januari 2025 2. Telah dilakukan breafing reformasi birokrasi tentang penguatan pelayanan public pada tanggal 03 Februari 2025 3. Telah dilakukan breafing reformasi birokrasi tentang manajemen pelayanan di BPKIL Serang pada tanggal 17 Maret 2025 4. Telah dilakukan breafing reformasi birokrasi tentang evaluasi pelayanan publik lingkup BPKIL Serang pada tanggal 28 April 2025 5. Telah dilakukan breafing reformasi birokrasi tentang Core Values BerAKHLAK pada tanggal 05 Mei 2025 6. Telah dilakukan breafing reformasi birokrasi tentang manajemen kinerja organisasi, pelayanan publik pada tanggal 30 Juni 2025
3.	Satuan kerja belum sepenuhnya memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang formal untuk keseluruhan prosedur dan keseluruhan kegiatan	Telah dilakukan sosialisasi perubahan SOP utama Tanggal 24 Februari 2025 dilakukan
4.	SOP yang ada tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	Telah dilakukan Monev SOP pada Tanggal 12 Februari 2025

No	Kelompok/Uraian Risiko	Komentar/Catatan
5.	SOP ada tetapi belum berbasis risiko	Telah mencantumkan tahapan pengendalian kualitas pelaksanaan kegiatan
6.	Ada pemisahan tugas dan fungsi tetapi tidak berjalan secara optimal atau terjadi tumpang tindih	Ada pemisahan tugas dan fungsi tetapi masih perlu penyempurnaan.
B. Perencanaan		
1.	Perencanaan/penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) belum melibatkan pihak yang berkompeten (aspek teknis pekerjaan/kinerja dan aspek keuangan)	Perencanaan/penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) SUDAH melibatkan pihak yang berkompeten, Bagian program DJPB, Biro Perencanaan dan Inspektorat jenderal dan pegawai BPKIL Serang. Telah dilakukan revisi POK pada tanggal 06 Februari 2025, revisi ke-2 tanggal 24 Februari 2025, revisi ke-3 tanggal 08 April 2025, revisi ke-4 tanggal 17 April 2025
2.	Perencanaan barang/aset melebihi dari kebutuhan yang seharusnya dan belum didasarkan pada asas kebutuhan	Perencanaan barang/ aset SESUAI dari kebutuhan yang seharusnya dan SUDAH didasarkan pada asas kebutuhan (RK BMN)
3.	Perencanaan barang/aset belum mempertimbangkan risiko pada tahap pemanfaatan	Perencanaan barang/ aset BELUM SEPENUHNYA mempertimbangkan risiko pada tahap pemanfaatan. Perlu dipertimbangkan lebih lanjut terkait mitigasi pemanfaatan
4.	Perencanaan belum mempertimbangkan kapasitas satuan kerja (kuantitas dan kompetensi SDM)	Secara kuantitas dan kompetensi belum terpenuhi kebutuhan untuk jabatan fungsional perencanaan.
5.	Perencanaan belum mempertimbangkan risiko dan belum menetapkan rencana pengendalian dalam pencapaian tujuan kebijakan dan aktivitas/kegiatan untuk kegiatan yang seharusnya memerlukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko	Perencanaan SUDAH mempertimbangkan risiko dan SUDAH menetapkan rencana pengendalian dalam pencapaian tujuan kebijakan dan aktivitas/kegiatan untuk kegiatan yang seharusnya memerlukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko
6.	Kurangnya keterpaduan, konsistensi, dan sinkronisasi antara perencanaan kinerja dan anggaran	Telah dilakukan reuiu oleh Inspektorat Jenderal terkait dengan perencanaan kinerja dan anggaran
7.	Terdapat usulan kegiatan yang sama dengan tugas dan fungsi instansi lain, dan/atau tumpang tindih dengan tugas dan fungsi instansi lain	Tidak terdapat program pengawasan yang tumpang tindih dengan instansi lain
8.	Terdapat kesalahan dalam perlakuan dan pengakuan keuangan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	Telah dilakukan reuiu RKAKL oleh Inspektorat Jenderal

No	Kelompok/Uraian Risiko	Komentar/Catatan
C.	Pelaksanaan Anggaran	
1.	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid/tidak sesuai ketentuan)	Telah dilakukan verifikasi dalam pertanggungjawaban Keuangan oleh PPK/ Staf Pengelola PPK.
2.	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	Pekerjaan dilaksanakan TIDAK mendahului kontrak atau penetapan anggaran.
3.	Proses pengadaan barang/ jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	Telah dilakukan penyusunan nilai HPS dalam proses pengadaan Barang/Jasa
4.	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	TIDAK TERDAPAT pemecahan kontrak untuk menghindar Lelang dan telah dilakukan proses PBJ melalui e-katalog
5.	Pelaksanaan lelang secara proforma	Menghindari kegiatan lelang proformas dengan melakukan PBJ melalui e-katalog atau pengadaan langsung
6.	Penyetoran penerimaan negara/daerah atau kas di bendaharawan ke Kas negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	Penyetoran PNPB telah dilakukan melalui kode billing
7.	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	Telah dimonitor secara berkala terkait dengan penyelesaian UP
8.	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum/tidak disetor ke kas negara/daerah	Telah dilakukan Kas Opname pada akhir periode tahunan, sebagaimana LPJ Desember 2024.
9.	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	Seluruh BMN telah memiliki bukti yang sah. Dan telah di label dengan daftar NUP.
10.	Pengalihan/revisi anggaran tidak sesuai ketentuan	Setiap revisi anggaran selalu dilakukan Reviu oleh Kementerian Keuangan melalui Kanwil
11.	Kesalahan pembebanan anggaran dan pelampauan terhadap pagu anggaran	Setiap revisi anggaran selalu dilakukan Reviu oleh Kementerian Keuangan melalui Kanwil
12.	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)	Tidak terdapat belanja diluar mekanisme APBN

No	Kelompok/Uraian Risiko	Komentar/Catatan
13.	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran	Terdapat SK Pengelola Keuangan di lingkup BPKIL Serang antara lain KEPMENKP Nomor KEP.22/MEN-KP/KU.611/2022 tentang penunjukan KPA, KEPMENKP Nomor 6/BPKIL/OT.210/I/2025 tentang penetapan PPK dan PPSPM, KEPMENKP Nomor 7/BPKIL/OT.210/I/2025 tentang pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan, SK KPA Nomor B.8/BPKIL/TU.210/I/2025 tentang Penetapan Pejabat Staf Pengelola Keuangan.
14.	Pelaksanaan pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran tidak/kurang memadai	SK terkait pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran telah memadai dan terimplementasikan menurut peran dan tanggung jawab sebagaimana dalam SK Pejabat/user/pengguna aplikasi SAKTI yang meliputi KPA, PPK, PPSPM, BP, BPP, Anggaran, Opr Pembayaran dan Opr Pelaporan sesuai Surat Tugas Kepala BPKIL Serang Nomor 15/BPKIL/KKP.440/I/2023
15.	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	Penggunaan anggaran telah sesuai menurut peruntukan dan pembebanan akun sesuai Peraturan Bagan Akun Standar
D.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	
1.	Penerimaan negara atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan dipungut/diterima/disetor ke kas negara	Penerimaan negara sudah dipungut dan disetorkan ke kas negara. Besaran PNBP BPKIL Serang Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah), yang terdiri dari PNBP Umum, sebesar Rp0,00; dan PNBP Fungsional, sebesar Rp1.100.000.000,00. Secara keseluruhan, pencapaian PNBP BPKIL Serang pada Semester I Tahun 2025 sebesar Rp596.979.291,00 atau 54,27%.

No	Kelompok/Uraian Risiko	Komentar/Catatan
2.	Penggunaan langsung terhadap penerimaan negara	Penggunaan langsung terhadap penerimaan negara SESUAI dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 187/KMK.02/2007 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (Di Luar Sumber Daya Alam Perikanan) Di Lingkungan Departemen Kelautan Dan Perikanan. Realisasi penggunaan anggaran yang bersumber dari PNBp pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp251.793.775 (29,01%) dari Total Nilai Rp867.986.000.
3.	Penerimaan negara diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak	Penerimaan negara TIDAK diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak
4.	Pengenaan tariff pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	Pengenaan tariff pajak sesuai dengan PMK No 1 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
5.	Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan, serta penggunaan Penerimaan negara tidak sesuai ketentuan	Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan, serta penggunaan Penerimaan negara sudah SESUAI ketentuan
E. Akuntansi dan Pelaporan		
1.	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	Pencatatan atas transaksi Keuangan telah dilakukan dan di rekonsiliasi dengan KPPN selaku Kuasa BUN, sebagaimana LPJ BP Januari sd Juni 2025
2.	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	Penyusunan Laporan telah merujuk PMK 222 tahun 2012, dan Surat Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor 31/PB/PB.6/2023 tanggal 29 Desember 2023.
3.	Entitas terlambat menyampaikan laporan	Laporan Keuangan Semester I tahun 2025 Juknis Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025, sbgmana Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor B.672/SJ/KU.510/VII/2025 hal Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester I Tahun 2025.

No	Kelompok/Uraian Risiko	Komentar/Catatan
4.	Pelaporan tidak/belum mengacu pada kaidah- kaidah yang berlaku	Penyusunan Laporan telah merujuk PMK 222 tahun 2012.
5.	Pelaporan belum didukung SDM yang memadai	Penyusunan Laporan Keuangan di susun oleh Pejabat Fungsional APK APBN
6.	Perhitungan penyusutan tidak sesuai ketentuan	Perhitungan penyusutan BMN diperhitungkan secara otomatisasi melalui aplikasi SIMAN
7.	Pengelolaan BMN termasuk persediaan belum dilakukan secara memadai	Pengelolaan BMN dan Persediaan telah dilakukan kas Opname semester I tahun 2025, dan di tuangkan dalam laporan BMN Semester I tahun 2025
F. Kerugian Negara		
1.	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif	NIHIL
2.	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	NIHIL
3.	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	NIHIL
4.	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	NIHIL
5.	Pemahalan harga (<i>Mark up</i>)	NIHIL
6.	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	NIHIL
7.	Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan	NIHIL
8.	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	NIHIL
9.	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	NIHIL
10.	Penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara tidakse suai ketentuan dan merugikan Negara	NIHIL
11.	Penyetoran penerimaan negara dengan bukti fiktif	NIHIL

No	Kelompok/Uraian Risiko	Komentar/Catatan
12.	Kelebihan pembayarand alam pengadaan barang/jasa tetapi pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	NIHIL
13.	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	NIHIL
14.	Aset dikuasai pihak lain	NIHIL
15.	Pembelian aset yang berstatus sengketa	NIHIL
16.	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada Negara	NIHIL
17.	Pencairan anggaran pada akhir tahun anggaran untuk pekerjaan yang belum selesai	NIHIL
G. Kepegawaian		
1.	Pegawai yang ada belum seluruhnya menaati jam kerja	Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi Kode Etik lingkup BPKIL Serang Semester I, sesuai laporan Monev kode etik
2.	Dalam menjalankan tugas dan fungsi, terdapat pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya	Telah disusun Laporan Peningkatan Kualitas SDM Pegawai BPKIL Serang Semester I Tahun 2025
3.	Instansi belum mempunyai rencana pengembangan pegawai	Telah disusun Laporan Rencana Diklat dan Tugas belajar pegawai
4.	Terdapat pegawai yang tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan tetapi belum dijatuhi hukuman disiplin	TIDAK terdapat pegawai yang tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan tetapi belum dijatuhi hukuman disiplin.
5.	Terdapat pegawai yang belum menjalankan tugas dan fungsinya	Telah disusun GAP Kompetensi SDM lingkup BPKIL Serang
H. Kinerja		
1.	Terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi instansi	kegiatan telah disusun dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja organisasi, sesuai dengan dokumen rencana aksi pencapaian target kinerja TW II 2025

No	Kelompok/Uraian Risiko	Komentar/Catatan
2.	Terdapat kegiatan belum dilaksanakan dan melewati batas waktu yang telah ditetapkan	Telah dilakukan evaluasi Tingkat kepatuhan pelaksanaan PKPT secara berkala (semesteran)
3.	Terdapat kegiatan sudah dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan	NIHIL
4.	Terdapat kegiatan yang tidak dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan	Telah dilakukan pemantauan perkembangan capaian Kinerja secara berkala (pengukuran kinerja triwulanan) melalui dokumen laporan pengukuran kinerja TW II 2025.
5.	Terdapat kegiatan, dalam pelaksanaannya menyimpang sehingga kemungkinan mengakibatkan tujuan tidak dapat dicapai	Seluruh pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan rencana kegiatan yang ditetapkan. melalui dokumen kepatuhan pelaksanaan PKPT secara berkala (semesteran) dokumen TW II 2025, dan monev rencana aksi pencapaian target kinerja TW I

3.2. Pengendalian Berkala

Pengendalian Berkala adalah kegiatan pengendalian yang dilakukan secara berkala dan terjadwal dalam suatu kurun waktu tertentu dengan cara menghimpun informasi mengenai kegiatan/aktivitas tertentu yang masih berjalan untuk memetakan hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan dalam suatu periode dan berkesinambungan, adapun pengendalian berkala yang telah dilaksanakan meliputi :

1. Pengendalian Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Keuangan
Dalam rangka memitigasi risiko, Inspektorat Jenderal telah memetakan kompetensi pengelola keuangan meliputi, PPK bersertifikasi PNT dan sertifikasi PPK Tipe C, PPSPM bersertifikasi PNT, BP dan BPP telah bersertifikat BNT, adapun bagi pengelola keuangan yang bersertifikasi namun berakhir masa berlakunya telah diusulkan untuk melakukan perpanjangan.
2. Pengendalian Penyusunan Anggaran
Anggaran pengawasan pada BPKIL Serang diprioritaskan untuk mendukung program kerja blue ekonomi Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya (2348), Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Payau (7022), Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Laut (7023) dan Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Tawar (7024) telah dilakukan reviu baik kesesuaian Bagan Akun Standar dan Standar Biaya Masukan. Penyusunan RKA KL telah direviu sebagaimana Laporan Hasil Reviu atas Penyusunan RKA-K/L (pagu indikatif) Lingkup DJPB Tahun Anggaran 2025.
3. Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa
Pengendalian terhadap pengadaan Barang/Jasa dari pagu Tahun 2025 senilai Rp11.864.065.000,00 terealisasi senilai Rp6.250.227.679,00 (52,68%) pada Semester I tahun 2025. Untuk meminimalisir fraud pengadaan diutamakan menggunakan e-katalog dan untuk pengadaan langsung dilakukan reviu dokumen oleh pejabat pengadaan terhadap dokumen persiapan pengadaan seperti Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan.

4. Pengendalian Barang Milik Negara (BMN)
Berkenaan dengan Pengendalian Barang Milik Negara, terhadap pegawai yang memasuki Batas Usia Pensiun dan Pegawai yang Mutasi diwajibkan menyerahkan BMN yang ada dalam kuasa yang bersangkutan dan dituangkan dalam Berita Acara, dalam hal tidak disampaikan maka tidak dapat diusulkan Surat Keterangan Penghentian Penghasilan (SKPP).
5. Pengendalian penyelesaian kerugian negara
Satuan Kerja BPKIL Serang tidak terdapat Kerugian Negara.
6. Pengendalian Penyerapan Anggaran
 - a) Realisasi anggaran berdasarkan aplikasi OMSPAN periode Juni 2025 sebesar Rp5.622.209.593,00 atau 47,93%, dari pagu Rp11.864.065.000,00 sehingga sisa anggaran sebesar Rp6.241.855.407,00 atau 52,07%. Target pada Halaman III DIPA pada Semester I 2025 sebesar Rp5.894.739.000,00 atau 49,68% dan terealisasi sebesar Rp5.622.209.593,00 atau 47,93%, sehingga terdapat deviasi negatif Rp272.529.407,00 atau -1,76%.
 - b) Telah dilakukan reviu penyerapan anggaran dan laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup BPKIL Serang Semester I Tahun 2025.

3.3. Pengendalian dengan Manajemen Risiko

Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko merupakan pengendalian yang dilakukan sebagai upaya untuk mencegah dan meminimalisasi timbulnya masalah pada waktu yang akan datang dalam mencapai tujuan. Pengendalian ini meliputi penilaian risiko, kegiatan pengendalian, pemantauan, dan pelaporan pengendalian risiko, termasuk berbagai strategi yang dijalankan untuk mengelola risiko dan mengurangi dampaknya sampai dengan tujuan tercapai. Pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko yang dirancang dan dimulai sejak perencanaan kebijakan dan perencanaan kegiatan/aktivitas, digunakan sebagai dasar menyusun rencana pengendalian dan menjadi data dukung dan dasar dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) yang merupakan penerapan perencanaan yang mempertimbangkan risiko atau perencanaan berbasis risiko.

3.4. Hambatan

Secara keseluruhan pelaksanaan penyelenggaraan SPIP di lingkungan BPKIL Serang telah dilaksanakan dengan baik, dari tahapan pengendalian rutin, pengendalian berkala dan pengendalian dengan Manajemen Risiko, namun terdapat beberapa hambatan dalam penyelenggaraan SPIP antara lain :

- a. Belum terdapat penyelerasan proses bisnis dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dibutuhkan.
- b. Belum terdapat mitigasi risiko terhadap faktor pemanfaatan pada PBJ yang tidak sesuai usulan kebutuhan.
- c. Belum dilaksanakan revalidasi internal pengelola keuangan dan pendampingan oleh pengawasan internal terkait dengan pertanggungjawaban keuangan.

3.5. Rencana Pemecahan Masalah

Berkaitan dengan hambatan pelaksanaan penyelenggaraan SPIP di lingkungan BPKIL Serang, berikut hal-hal yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan, sebagai berikut:

- a. Menyelaraskan antara proses bisnis dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dibutuhkan.
- b. Melakukan rencana mitigasi terkait dengan pemanfaatan PBJ yang tidak sesuai usulan kebutuhan.
- c. Melaksanakan revalidasi internal pengelola Keuangan dan mengikutsertakan pendampingan oleh pengawasan internal terkait dengan pertanggungjawaban keuangan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Secara keseluruhan pelaksanaan penyelenggaraan SPIP di lingkungan BPKIL Serang pada periode Semester I tahun 2025 telah dilaksanakan dengan baik berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dari 68 aspek kelompok uraian risiko pada pengendalian rutin, sebanyak 65 atau 96% telah dilaksanakan pengendalian, sedangkan 3 aspek atau 4% yang memerlukan perbaikan lebih lanjut yaitu pada aspek organisasi dan perencanaan BMN.
- b. Dari 6 aspek pengendalian berkala yang ada pada BPKIL Serang, seluruhnya atau 100% telah dilaksanakan dan tidak memerlukan perbaikan.
- c. Dari faktor risiko yang terdapat pada Pengendalian dengan Manajemen Risiko, seluruhnya sudah dilakukan tindakan pengendalian.

Terhadap hambatan - hambatan dalam permasalahan penyelenggaraan SPIP yang teridentifikasi telah dilakukan upaya rencana aksi sebagai tindak lanjut untuk perbaikan.

4.2. Saran

Sebagai upaya peningkatan pelaksanaan penyelenggaraan SPIP di lingkungan BPKIL Serang, perlu dilakukan hal - hal sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi antar satuan tugas SPIP dengan pemilik risiko di lingkungan BPKIL Serang.
- b. Melaksanakan rencana pemecahan masalah yang telah disusun.

LAMPIRAN

PENGENDALIAN KAPASITAS SDM PENGELOLA KEUANGAN

1. Satuan Kerja : Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang
2. Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
3. Tahun Anggaran : 2025

NO	URAIAN	KPA	PPK *)	PEJABAT PENGUJI/ PENANDATANGAN SPM*)	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Nama Lengkap	drh. Toha Tusihadi	Dwi Rahwanto, S.Pi.	drh. M. Aziz Hakim	Iman Suseno, A.Md.	Indra Pratama, A.Md.
2	Nomor dan Tanggal SK	KEPMENKP Nomor KEP.22/MEN- KP/KU.611/2022 Tanggal 11 Maret 2022	KEPMENKP Nomor 6/BPKIL/OT.210/I/ 2025 Tanggal 02 Januari 2025	KEPMENKP Nomor 6/BPKIL/OT.210/I/ 2025 Tanggal 02 Januari 2025	KEPMENKP Nomor 7/BPKIL/OT.210/I/ 2025 Tanggal 02 Januari 2025	KEPMENKP Nomor 7/BPKIL/OT.210/I/ 2025 Tanggal 02 Januari 2025
3	Nomor HP	081210036386	081326444452	081382016611	081317601234	085283145623
4	Email	tohatusihadi@gmail.com	dwirahwanto@gmail.com	azizqozief@gmail.com	iman.suseno@kpk.go.id	indrapratama12345@yahoo.co.id
5	Pendidikan Terakhir	S2	S1	S2	D3	D3
6	Sertifikasi					
	a. Pengadaan Barang/Jasa		V			
	b. Bendahara				V	
	c. Standar Akuntansi pemerintah		V	V		V
	e. Lainnya (Sebutkan)		V PPK Tipe C			
7	Usulan/Rencana Pengembangan SDM **)			Perpanjangan PNT		

PENGENDALIAN PENYUSUNAN ANGGARAN

1. Satuan Kerja : Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang
2. Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
3. Tahun Anggaran : 2025

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT/KOMPONEN	KESESUAIAN DENGAN	HASIL PENGENDALIAN OLEH					
			PENGUSUL		BAG. KEUANGAN SATKER		BAGIAN KEUANGAN UNIT ESELON I	
			YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Payau (7022)	a. BAGAN AKUN STANDAR	V		V		V	
		b. STANDAR BIAYA MASUKAN	V		V		V	
		c. STANDAR BIAYA LAINNYA	-		-		-	
2	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Laut (7023)	a. BAGAN AKUN STANDAR	V		V		V	
		b. STANDAR BIAYA MASUKAN	V		V		V	
		c. STANDAR BIAYA LAINNYA	-		-		-	
3	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Tawar (7024)	a. BAGAN AKUN STANDAR	V		V		V	
		b. STANDAR BIAYA MASUKAN	V		V		V	
		c. STANDAR BIAYA LAINNYA	-		-		-	
4	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya (2348)	a. BAGAN AKUN STANDAR	V		V		V	
		b. STANDAR BIAYA MASUKAN	V		V		V	
		c. STANDAR BIAYA LAINNYA	-		-		-	

PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG/JASA

1. Satuan Kerja : Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang
2. Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
3. Tahun Anggaran : 2025

A. Rekapitulasi

Pelaksanaan Kegiatan	Target %	Realisasi				Jumlah (%)
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
Proses Pengadaan	57	37,68	57,97	-	-	57,97
Tanda Tangan Kontrak	57	37,68	57,97	-	-	57,97
Pelaksanaan	57	37,68	57,97	-	-	57,97
Serah Terima/ PHO	57	37,68	57,97	-	-	57,97

Keterangan : merupakan informasi perkembangan pelaksanaan pengadaan secara keseluruhan

PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA

1. Satuan Kerja : Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang
2. Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
3. Tahun Anggaran : 2025

No.	Jenis BMN	Nilai BMN (Rp)*	Pengelolaan BMN			Permasalahan BMN					Rencana Pemecahan Masalah	Realisasi Pemecahan Masalah
			Satker	Pihak III	KSO	Sengketa	Kelengkapan Dokumen	Hilang	Rusak	Lainnya		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A. Bergerak												
1.	Mini Bus	173.840.500	567800			-	STNK, BPKB					
2.	Mini Bus	252.160.000	567800			-	STNK, BPKB					
3.	Mini Bus	225.000.000	567800			-	STNK, BPKB					
4.	Pick Up	112.500.000	567800			-	STNK, BPKB					
5.	Sepeda Motor	16.465.000	567800			-	STNK, BPKB					
6.	Sepeda Motor	19.000.000	567800			-	STNK, BPKB					
7.	Sepeda Motor	14.950.000	567800			-	STNK, BPKB					
8.	Sepeda Motor	16.500.000	567800			-	STNK, BPKB					
9.	Mobil Unit Kesehatan Ikan	372.790.000	567800			-	STNK, BPKB					
	Subtotal	1.575.445.500										
B. Tidak Bergerak												
1.	Tanah	45.324.001.000	567800			-	Sertifikat					
2.	Gedung dan Bangunan	30.920.333.113	567800			-	IMB					
3.	Jalan	102.807.000	567800			-						
4.	Irigasi	148.114.000	567800			-						
5.	Jaringan	375.938.000	567800			-						
6.	Aset Tetap Lainnya	38.970.000	567800			-						
7.	Aset Tak berwujud	113.740.000	567800			-						

No.	Jenis BMN	Nilai BMN (Rp)*	Pengelolaan BMN			Permasalahan BMN					Rencana Pemecahan Masalah	Realisasi Pemecahan Masalah
			Satker	Pihak III	KSO	Sengketa	Kelengkapan Dokumen	Hilang	Rusak	Lainnya		
8.	Aset Tak Berwujud Lainnya	44.550.000	567800			-						
	Subtotal	125.278.548.467										
	TOTAL	126.853.993.967										

PENGENDALIAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

1. Satuan Kerja : Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang
 2. Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
 3. Tahun Anggaran : 2025

No.	Klasifikasi dan Uraian KN	Nilai Indikasi KN	Status Kerugian Negara				Permasalahan	Rencana Pemecahan Masalah	Realisasi Pemecahan Masalah
			Belum Ada Penetapan**)	Sudah Ada Penetapan					
				Tidak Ada Ganti Rugi	Pengenaan Ganti Rugi	Nilai			
A. Bendahara									
1.	Tidak ada								
	Subtotal	NIHIL							
B. Pegawai Negeri Bukan Bendahara									
1.	Tidak ada								
	Subtotal	NIHIL							
C. Pejabat Lain									
1.	Tidak ada								
	Subtotal	NIHIL							
	TOTAL	NIHIL							

PENGENDALIAN PENYERAPAN ANGGARAN

1. Satuan Kerja : Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang
2. Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
3. Tahun Anggaran : 2025

A. Progres Anggaran

Pagu Awal Rp11.864.065.000,00

	TRIWULAN I (Rp)	SEMESTER I (Rp)	SEMESTER II (Rp)	TRIWULAN IV (Rp)
Target	2.896.571.000	2.998.168.000	2.369.941.000	3.599.385.000
Realisasi	2.674.082.793	2.948.126.800		

B. Progres Fisik

	TRIWULAN I (%)	SEMESTER I (%)	SEMESTER II (%)	TRIWULAN IV (%)
Target	24,41	49,69	69,66	100
Realisasi	22,54	47,93		

FORMULIR PENILAIAN RISIKO

1. Satuan Kerja : Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang
2. Kegiatan : Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Payau
3. Output : Penyidikan dan Pengujian Penyakit
3. Pagu Anggaran : Rp 529.126.000,00
4. Tahun Anggaran : 2025

No.	Kebijakan/ Aktivitas/ Kegiatan	Tujuan	Faktor Risiko		Sebab	Dampak	Sifat	Sumber	Rencana	Persepsi Atas Risiko								Rata-Rata Risiko		Level/ Tingkat Risiko	PR	Respon Terhadap Risiko/Rencana Kegiatan Pengendalian										Risiko Residual	
										Evan		Ellis		Indri		Niezha						Uraian				Jadwal (Triwulan)							
										K	D	K	D	K	D	K	D	K	D			K	D	I	II	III	IV	K	D				
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				24	25					
1	Penyediaan bahan pengujian Sampel Residu, Kualitas Air, Patologi, Mikrobiologi, Biologi Molekuler, Nutrisi Pakan, Mutu pakan dan obat Ikan Air Payau	Pemenuhan kebutuhan bahan pengujian Sampel Residu, Kualitas Air, Patologi, Mikrobiologi, Biologi Molekuler, Nutrisi Pakan, Mutu pakan dan obat Ikan Air Payau	Ketidaktepatan dalam penyusunan HPS, Spesifikasi Teknis, dan rancangan kontrak	Risiko kinerja	Data dukung kurang	Proses pengadaan tertunda	C	BPKIL	Preventif	4	4	3	3	3	4	3	4	3,25	3,75	12,19	12	- Identifikasi kebutuhan bahan pengujian sampel - Refrensi harga	√					1	1				
					Fluktuasi kurs/harga	Adanya potensi kemahalan harga	C	Distributor	Preventif	3	2	3	2	2	2	2	3	2,50	2,25	5,63	6	Evaluasi harga secara berkala	√					1	1				
					Perencanaan kurang baik	Pelaksanaan kegiatan terlambat	C	BPKIL	Preventif	2	3	2	2	2	2	3	2	2,25	2,25	5,06	5	Membentuk Tim pendukung pengadaan barang dan jasa	√					1	1				
			Kualitas barang/jasa tidak sesuai dengan spesifikasi teknis/kuantitas pada kontrak	Risiko operasional	Kurangnya pengawasan PPK	Barang/jasa yang diterima tidak sesuai spesifikasi/volume yang dibutuhkan	C	BPKIL	Preventif	3	4	3	4	4	3	4	3	3,50	3,50	12,25	12	Menetapkan tim teknis pengadaan barang dan jasa	√					2	1				
					Kelalaian Penyedia	Pelaksanaan kegiatan terhambat	C	BPKIL	Preventif	2	3	2	2	2	3	3	3	2,25	2,75	6,19	6	Melakukan pemantauan dan monitoring PBJ	√					1	1				
					Perencanaan kurang baik	Barang/jasa yang diterima tidak sesuai spesifikasi/volume yang dibutuhkan	C	BPKIL	Preventif	2	2	2	2	2	2	3	2	2,25	2,00	4,50	5	Melaksanakan proses reviu penyusunan KAK dan HPS sebagai koreksi sebelum pelaksanaan pengadaan	√					1	1				
			Pemotongan Anggaran	Risiko keuangan	Kebijakan Pemerintah	Realisasi output tidak tercapai	UC	Pusat	Preventif	2	2	2	3	2	3	2	2	2,00	2,50	5,00	5	Pengadaan dilaksanakan di T-1	√					1	1				
					Automatic Adjusment	Berkurang atau hilangnya pagu anggaran	UC	Pusat	Preventif	4	3	3	4	3	4	3	4	3,25	3,75	12,19	12	Pengadaan dilaksanakan di T-1	√					2	1				
					Anggaran diblokir	Pekerjaan tidak dapat dilaksanakan	UC	Pusat	Preventif	3	2	2	3	2	2	2	2	2,25	2,25	5,06	5	Pengadaan dilaksanakan di T-1	√					1	1				

Keterangan :
Rencana Pengendalian dikhususkan pada setiap penyebab risiko yang bernilai paling tinggi (kolom uraian)

Serang, 27 September 2024

Unit Pemilik Risiko,

Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang

ua,



Toha Tusihadi

FORMULIR PENILAIAN RISIKO

1. Satuan Kerja : Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang
2. Kegiatan : Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Payau
3. Output : Penyidikan dan Pengujian Penyakit
4. Pagu Anggaran : Rp 451.807.000,00
5. Tahun Anggaran : 2025

No.	Kebijakan/ Aktivitas/ Kegiatan	Tujuan	Faktor Risiko		Sebab	Dampak	Sifat	Sumber	Rencana	Persepsi Atas Risiko								Rata-Rata Risiko		Level/ Tingkat Risiko	PR	Respon Terhadap Risiko/Rencana Kegiatan Pengendalian								Risiko Residual	
										Evan		Dinar		Niezha		Herman						Uraian				Jadwal (Triwulan)					
										K	D	K	D	K	D	K	D	K	D											I	II
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22								24	25
1	Penyediaan bahan pengujian sampel Surveilans Resistensi Antimikroba (AMR) / Surveilans Antimicrobial Use (AMU) dan sampel monitoring penyakit ikan air payau yang diuji	Pemenuhan kebutuhan bahan pengujian Sampel dan belanja modal peralatan dan mesin	Kesalahan dalam penyusunan HPS, Spesifikasi Teknis, dan rancangan kontrak	Risiko kinerja	Data dukung kurang	Proses pengadaan tertunda	C	BPKIL	Preventif	4	3	4	4	4	4	3	3	3,75	3,50	13,13	13	- Identifikasi kebutuhan bahan pengujian sampel - Refrensi harga	√					2	1		
					Fluktuasi kurs/harga	Adanya potensi kemahalan harga	C	Distributor	Preventif	3	2	3	2	2	3	2	3	2,50	2,50	6,25	6	Evaluasi harga secara berkala	√					1	1		
					Perencanaan kurang baik	Pelaksanaan kegiatan terlambat	C	BPKIL	Preventif	2	2	2	2	2	3	3	3	2,25	2,50	5,63	6	Membentuk Tim pendukung pengadaan barang dan jasa	√					1	1		
			Kualitas barang/jasa tidak sesuai dengan spesifikasi teknis/kuantitas pada kontrak	Risiko operasional	Kurangnya pengawasan PPK	Barang/jasa yang diterima tidak sesuai spesifikasi/volume yang dibutuhkan	C	BPKIL	Preventif	4	3	3	4	3	3	3	3	3,25	3,25	10,56	11	Menetapkan tim teknis pengadaan barang dan jasa	√					2	2		
					Kelalaian Penyedia	Pelaksanaan kegiatan terhambat	C	BPKIL	Preventif	2	3	2	2	3	2	3	3	2,50	2,50	6,25	6	Melakukan pemantauan dan monitoring PBJ	√					1	1		
					Perencanaan kurang baik	Barang/jasa yang diterima tidak sesuai spesifikasi/volume yang dibutuhkan	C	BPKIL	Preventif	2	2	2	2	2	2	3	3	2,25	2,25	5,06	5	Melaksanakan proses reviu penyusunan KAK dan HPS sebagai koreksi sebelum pelaksanaan pengadaan	√					1	1		
			Pemotongan Anggaran	Risiko keuangan	Kebijakan Pemerintah	Realisasi output tidak tercapai	UC	Pusat	Preventif	3	3	2	2	2	2	2	2	2,25	2,25	5,06	5	Pengadaan dilaksanakan di bulan Januari	√					1	1		
					Automatic Adjustment	Berkurang atau hilangnya pagu anggaran	UC	Pusat	Preventif	3	3	3	2	3	3	3	2	3,00	2,50	7,50	8	Pengadaan dilaksanakan di bulan Januari	√					1	1		
					Anggaran diblokir	Pekerjaan tidak dapat dilaksanakan	UC	Pusat	Preventif	2	2	2	2	2	3	2	3	2,00	2,50	5,00	5	Pengadaan dilaksanakan di bulan Januari	√					1	1		

Keterangan :
Rencana Pengendalian dikhususkan pada setiap penyebab risiko yang bernilai paling tinggi (kolom uraian)

Serang, 27 September 2024

Unit Pemilik Risiko,

Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang



Toha Tusihadi

FORMULIR PENILAIAN RISIKO

1. Satuan Kerja : Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang
2. Kegiatan : Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan
3. Output : Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
4. Pagu Anggaran : Rp 950.000.000,00
5. Tahun Anggaran : 2025

No.	Kebijakan/ Aktivitas/ Kegiatan	Tujuan	Faktor Risiko		Sebab	Dampak	Sifat	Sumber	Rencana	Persepsi Atas Risiko								Rata-Rata Risiko		Level/ Tingkat Risiko	PR	Respon Terhadap Risiko/Rencana Kegiatan Pengendalian								Risiko Residual	
										Dwi		Wiwin		Iman		Aziz						Uraian				Jadwal (Triwulan)					
										K	D	K	D	K	D	K	D	K	D			K	D	I	II	III	IV	K	D		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				23				24	25
1	Infrastructure Improvement of Shrimp Aquaculture Project (IISAP)	Pemenuhan kegiatan penunjang untuk kegiatan IISAP	Keterlambatan kegiatan	Risiko kinerja	Kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan awal	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai target	C	BPKIL	Preventif	4	3	4	3	4	3	3	3	3,75	3,00	11,25	11	Revisi RKAKL	√					2	1		
					Anggaran diblokir	Pekerjaan tidak dapat dilaksanakan	UC	Pusat	Preventif	2	2	3	2	3	2	4	3	3,00	2,25	6,75	7	Melengkapi Data dukung	√					1	1		
					Perubahan kegiatan	kegiatan tidak sesuai	C	BPKIL	Preventif	2	3	3	3	3	2	2	3	2,50	2,75	6,88	7	Koordinasi secara berkala	√					1	1		
			Pemotongan anggaran	Risiko keuangan	Kebijakan Pemerintah	Realisasi output tidak tercapai	UC	Pusat	Preventif	3	3	2	2	3	2	2	2	2,50	2,25	5,63	6	Koordinasi secara berkala	√					1	1		
					Automatic Adjusmerit	Berkurang atau hilangnya pagu anggaran	UC	Pusat	Preventif	2	3	3	2	3	2	3	2	2,75	2,25	6,19	6	Koordinasi secara berkala	√					1	1		
					Kegiatan prioritas	Pekerjaan tidak dapat dilaksanakan	UC	Pusat	Preventif	2	2	3	2	2	2	2	3	2,25	2,25	5,06	5	Koordinasi secara berkala	√					1	1		

Keterangan :
Rencana Pengendalian dikhususkan pada setiap penyebab risiko yang bernilai paling tinggi (kolom uraian)

Serang, 27 September 2024

Unit Pemilik Risiko,

Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang



Toha Tusthadi

FORMULIR PENILAIAN RISIKO

1. Satuan Kerja : Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang
 2. Kegiatan : Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Tawar
 3. Output : Penyidikan dan Pengujian Penyakit
 3. Pagu Anggaran : Rp 362.535.000,00
 4. Tahun Anggaran : 2025

No.	Kebijakan/ Aktivitas/ Kegiatan	Tujuan	Faktor Risiko	Sebab	Dampak	Sifat	Sumber	Rencana	Persepsi Atas Risiko								Rata-Rata Risiko		Level/ Tingkat Risiko	PR	Respon Terhadap Risiko/Rencana Kegiatan Pengendalian								Risiko Residual	
									Evan		Ellis		Indri		Niezha						Uraian		Jadwal (Triwulan)							
									K	D	K	D	K	D	K	D	K	D			K	D	I	II	III	IV	K	D		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				24	25			
1	Penyediaan bahan pengujian Sampel Residu, Kualitas Air, Patologi, Mikrobiologi, Biologi Molekuler, Nutrisi Pakan, Mutu pakan dan obat ikan Air Tawar	Pemenuhan kebutuhan bahan pengujian Sampel Residu, Kualitas Air, Patologi, Mikrobiologi, Biologi Molekuler, Nutrisi Pakan, Mutu pakan dan obat ikan Air tawar	Kesalahan dalam penyusunan HPS, Spesifikasi Teknis, dan rancangan kontrak	Risiko kinerja	Data dukung kurang	Proses tender tertunda	C	BPKIL	Preventif	4	4	3	3	3	4	3	4	3,25	3,75	12,19	12	- Identifikasi kebutuhan bahan pengujian sampel - Referensi harga	√					2	1	
					Fluktuasi kurs/harga	Adanya potensi kemahalan harga	C	Distributor	Preventif	3	2	3	2	2	2	3	2	2,50	2,25	5,63	6	Evaluasi harga secara berkala	√					1	1	
					Perencanaan kurang baik	Pelaksanaan kegiatan terlambat	C	BPKIL	Preventif	2	3	2	2	2	3	2	2,25	2,25	5,06	5	Membentuk Tim pendukung pengadaan barang dan jasa	√					1	1		
		Kualitas barang/jasa tidak sesuai dengan spesifikasi teknis/kuantitas pada kontrak	Risiko operasional	Kurangnya pengawasan PPK	Barang/jasa yang diterima tidak sesuai spesifikasi/volume yang dibutuhkan	C	BPKIL	Preventif	3	4	3	4	4	3	4	3	3,50	3,50	12,25	12	Menetapkan tim teknis pengadaan barang dan jasa	√					2	2		
				Kelalaian Penyedia	Pelaksanaan kegiatan terhambat	C	BPKIL	Preventif	2	3	2	2	2	3	3	3	2,25	2,75	6,19	6	Melakukan pemantauan dan monitoring PBJ	√					1	1		
				Perencanaan kurang baik	Barang/jasa yang diterima tidak sesuai spesifikasi/volume yang dibutuhkan	C	BPKIL	Preventif	3	2	2	2	2	3	2	2,50	2,00	5,00	5	Melaksanakan proses reviu penyusunan KAK dan HPS sebagai koreksi sebelum pelaksanaan pengadaan	√					1	1			
		Pemotongan Anggaran	Risiko keuangan	Kebijakan Pemerintah	Realisasi output tidak tercapai	UC	Pusat	Preventif	3	2	2	3	2	2	2	2	2,25	2,25	5,06	5	Pengadaan dilaksanakan di bulan Januari	√					1	1		
				Automatic Adjustment	Berkurang atau hilangnya pagu anggaran	UC	Pusat	Preventif	4	3	3	4	3	4	3	4	3,25	3,75	12,19	12	Pengadaan dilaksanakan di bulan Januari	√					2	2		
				Anggaran diblokir	Pekerjaan tidak dapat dilaksanakan	UC	Pusat	Preventif	3	2	2	3	2	2	2	2	2,25	2,25	5,06	5	Pengadaan dilaksanakan di bulan Januari	√					1	1		

Keterangan :

Rencana Pengendalian dikhususkan pada setiap penyebab risiko yang bernilai paling tinggi (kolom uraian)

Serang, 27 September 2024
 Unit Pemilik Risiko,
 Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang
 a,

 Toha Tusihadi

FORMULIR PENILAIAN RISIKO

1. Satuan Kerja : Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang
2. Kegiatan : Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Tawar
3. Output : Penyidikan dan Pengujian Penyakit
4. Pagu Anggaran : Rp 161.205.000,00
5. Tahun Anggaran : 2025

No.	Kebijakan/ Aktivitas/ Kegiatan	Tujuan	Faktor Risiko	Sebab	Dampak	Sifat	Sumber	Rencana	Persepsi Atas Risiko								Rata-Rata Risiko		Level/ Tingkat Risiko	PR	Respon Terhadap Risiko/Rencana Kegiatan Pengendalian										Risiko Residual	
									Evan		Dinar		Niezha		Herman						Uraian		Jadwal (Triwulan)									
									K	D	K	D	K	D	K	D	K	D			K	D	I	II	III	IV	K	D				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					24	25				
1	Penyediaan bahan pengujian sampel Surveilan Resistensi Antimikroba (AMR) / Surveilan Antimicrobial Use (AMU) dan sampel monitoring penyakit ikan air tawar yang diuji	Pemenuhan kebutuhan bahan pengujian Sampel dan belanja modal peralatan dan mesin	Kesalahan dalam penyusunan HPS, Spesifikasi Teknis, dan rancangan kontrak	Risiko kinerja	Data dukung kurang	Proses pengadaan tertunda	C	BPKIL	Preventif	4	3	4	4	4	4	3	3	3,75	3,50	13,13	13	- Identifikasi kebutuhan bahan pengujian sampel - Refrensi harga	√					2	1			
					Fluktuasi kurs/harga	Adanya potensi kemahalan harga	C	Distributor	Preventif	3	2	3	2	2	3	2	3	2,50	2,50	6,25	6	Evaluasi harga secara berkala	√					1	1			
					Perencanaan kurang baik	Pelaksanaan kegiatan terlambat	C	BPKIL	Preventif	2	2	2	2	2	3	3	3	2,25	2,50	5,63	6	Membentuk Tim pendukung pengadaan barang dan jasa	√					1	1			
			Kualitas barang/jasa tidak sesuai dengan spesifikasi teknis/kuantitas pada kontrak	Risiko operasional	Kurangnya pengawasan PPK	Barang/jasa yang diterima tidak sesuai spesifikasi/volume yang dibutuhkan	C	BPKIL	Preventif	3	3	3	4	4	3	3	3	3,25	3,25	10,56	11	Menetapkan tim teknis pengadaan barang dan jasa	√					2	2			
					Kelalaian Penyedia	Pelaksanaan kegiatan terhambat	C	BPKIL	Preventif	2	3	2	2	3	2	3	3	2,50	2,50	6,25	6	Melakukan pemantauan dan monitoring PBJ	√					1	1			
					Perencanaan kurang baik	Barang/jasa yang diterima tidak sesuai spesifikasi/volume yang dibutuhkan	C	BPKIL	Preventif	2	2	2	2	2	2	3	3	2,25	2,25	5,06	5	Melaksanakan proses reviu penyusunan KAK dan HPS sebagai koreksi sebelum pelaksanaan pengadaan	√					1	1			
			Pemotongan Anggaran	Risiko keuangan	Kebijakan Pemerintah	Realisasi output tidak tercapai	UC	Pusat	Preventif	3	3	2	2	2	2	2	2	2,25	2,25	5,06	5	Pengadaan dilaksanakan di bulan Januari	√					1	1			
					Automatic Adjustment	Berkurang atau hilangnya pagu anggaran	UC	Pusat	Preventif	3	3	3	2	3	3	3	2	3,00	2,50	7,50	8	Pengadaan dilaksanakan di bulan Januari	√					1	1			
					Anggaran diblokir	Pekerjaan tidak dapat dilaksanakan	UC	Pusat	Preventif	2	2	2	2	2	3	2	3	2,00	2,50	5,00	5	Pengadaan dilaksanakan di bulan Januari	√					1	1			

Keterangan :
Rencana Pengendalian dikhususkan pada setiap penyebab risiko yang bernilai paling tinggi (kolom uraian)

Serang, 27 September 2024

Unit Pemilik Risiko,

Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang

a,



Toha Tusihadi

FORMULIR PENILAIAN RISIKO

1. Satuan Kerja : Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang
2. Kegiatan : Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Laut
3. Output : Sosialisasi dan Diseminasi
4. Pagu Anggaran : Rp 400.000.000,00
5. Tahun Anggaran : 2025

No.	Kebijakan/ Aktivitas/ Kegiatan	Tujuan	Faktor Risiko	Sebab	Dampak	Sifat	Sumber	Rencana	Persepsi Atas Risiko								Rata-Rata Risiko		Level/ Tingkat Risiko	PR	Respon Terhadap Risiko/Rencana Kegiatan Pengendalian					Risiko Residual		
									Dwi		Ellis		Niezha		Indra						Uraian	Jadwal (Triwulan)						
									K	D	K	D	K	D	K	D	K	D				I	II	III	IV	K	D	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
1	Sosialisasi/Diseminasi/ Bimtek Bidang Perikanan Budidaya	Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan Pembudidaya Ikan	Jumlah peserta bimtek yang hadir tidak 100%	Risiko reputasi	kurangnya koordinasi dengan dinas	peserta bimtek yang hadir tidak sesuai target	C	BPKIL	Preventif	3	3	4	3	4	3	3	4	3,50	3,25	11,38	11	melakukan koordinasi dengan dinas	√	√			2	1
					kurangnya sosialisasi kegiatan bimtek yang akan dilaksanakan	kegiatan tidak terinfokan ke pembudidaya	UC	Pusat	Preventif	3	2	3	2	2	3	3	3	2,75	2,50	6,88	7	Undangan Bimtek ke pembudidaya	√				1	1
					pembudidaya tidak mengetahui manfaat pentingnya kegiatan bimtek	Materi bimtek yang disampaikan tidak tepat sasaran	C	BPKIL	Preventif	2	3	3	3			2	3	2,33	3,00	7,00	7	Materi bimtek sesuai dengan kebutuhan pembudidaya	√	√			1	1
			Pemotongan anggaran	Risiko kinerja	Kebijakan Pemerintah	Realisasi output tidak tercapai	UC	Pusat	Preventif	3	3	2	2			2	2	2,33	2,33	5,44	5	koordinasi dengan pusat	√				1	1
					Automatic Adjusment	Berkurang atau hilangnya pagu anggaran	UC	Pusat	Preventif	2	3	3	2			3	2	2,67	2,33	6,22	6	koordinasi dengan pusat	√				1	1
					Kegiatan prioritas	Pekerjaan tidak dapat dilaksanakan	UC	Pusat	Preventif	2	2	3	2			2	3	2,33	2,33	5,44	5	koordinasi dengan pusat	√				1	1

Keterangan :
Rencana Pengendalian dikhususkan pada setiap penyebab risiko yang bernilai paling tinggi (kolom uraian)

Serang, 27 September 2024

Unit Pemilik Risiko,

Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang

ua,



Toha Tusthadi

FORMULIR PENILAIAN RISIKO

1. Satuan Kerja : Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang
 2. Kegiatan : Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Laut
 3. Output : Penyidikan dan Pengujian Penyakit
 3. Pagu Anggaran : Rp 140.000.000,00
 4. Tahun Anggaran : 2025

No.	Kebijakan/ Aktivitas/ Kegiatan	Tujuan	Faktor Risiko		Sebab	Dampak	Sifat	Sumber	Rencana	Persepsi Atas Risiko								Rata-Rata Risiko		Level/ Tingkat Risiko	PR	Respon Terhadap Risiko/Rencana Kegiatan Pengendalian								Risiko Residual	
										Evan		Ellis		Indri		Niezha						Uraian				Jadwal (Triwulan)					
										K	D	K	D	K	D	K	D	K	D			K	D	I	II	III	IV	K	D		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				23				24	25
1	Penyediaan bahan pengujian Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Laut yang diuji	Pemenuhan kebutuhan bahan pengujian Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Laut yang diuji	Kesalahan dalam penyusunan HPS, Spesifikasi Teknis, dan rancangan kontrak	Risiko kinerja	Data dukung kurang	Proses tender tertunda	C	BPKIL	Preventif	4	4	3	3	3	4	3	4	3,25	3,75	12,19	12	- Identifikasi kebutuhan bahan pengujian sampel - Refrensi harga	√					1	1		
					Fluktuasi kurs/harga	Adanya potensi kemahalan harga	C	Distributor	Preventif	3	2	3	2	2	2	2	3	2,50	2,25	5,63	6	Evaluasi harga secara berkala	√					1	1		
					Perencanaan kurang baik	Pelaksanaan kegiatan terlambat	C	BPKIL	Preventif	2	3	2	2	2	2	3	2	2,25	2,25	5,06	5	Membentuk Tim pendukung pengadaan barang dan jasa	√					1	1		
				Kualitas barang/jasa tidak sesuai dengan spesifikasi teknis/kuantitas pada kontrak	Risiko operasional	Kurangnya pengawasan PPK	Barang/jasa yang diterima tidak sesuai spesifikasi/volume yang dibutuhkan	C	BPKIL	Preventif	3	4	3	4	4	3	4	3	3,50	3,50	12,25	12	Menetapkan tim teknis pengadaan barang dan jasa	√					1	1	
						Kelalaian Penyedia	Pelaksanaan kegiatan terhambat	C	BPKIL	Preventif	2	3	2	2	2	3	3	3	2,25	2,75	6,19	6	Melakukan pemantauan dan monitoring PBJ	√					1	1	
						Perencanaan kurang baik	Barang/jasa yang diterima tidak sesuai spesifikasi/volume yang dibutuhkan	C	BPKIL	Preventif	3	2	2	2	2	2	3	2	2,50	2,00	5,00	5	Melaksanakan proses reviu penyusunan KAK dan HPS sebagai koreksi sebelum pelaksanaan pengadaan	√					1	1	
			Pemotongan Anggaran	Risiko keuangan	Kebijakan Pemerintah	Realisasi output tidak tercapai	UC	Pusat	Preventif	2	2	2	3	2	3	2	2	2,00	2,50	5,00	5	Pengadaan dilaksanakan di bulan Januari	√					1	1		
					Automatic Adjusment	Berkurang atau hilangnya pagu anggaran	UC	Pusat	Preventif	4	3	3	4	3	4	3	4	3,25	3,75	12,19	12	Pengadaan dilaksanakan di bulan Januari	√					1	1		
					Anggaran diblokir	Pekerjaan tidak dapat dilaksanakan	UC	Pusat	Preventif	3	2	2	3	2	2	2	2	2,25	2,25	5,06	5	Pengadaan dilaksanakan di bulan Januari	√					1	1		

Keterangan :

Rencana Pengendalian dikhususkan pada setiap penyebab risiko yang bernilai paling tinggi (kolom uraian)

Serang, 27 September 2024
 Unit Pemilik Risiko,
 Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang

a.

 Foha Tusihadi

PEMANTAUAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

1. Satuan Kerja : Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang
 2. Kegiatan : Penyidikan dan Pengujian Penyakit
 3. Tujuan Kegiatan : Pemenuhan kebutuhan bahan pengujian Sampel Residu, Kualitas Air, Patologi, Mikrobiologi, Biologi Molekuler, Nutrisi Pakan, Mutu pakan dan obat Ikan Air Payau

No.	Uraian Risiko	Sebab	Pemilik Risiko	Risiko Awal		Rencana Kegiatan Pengendalian	Pemantauan		Sisa Risiko setelah Pemantauan		Hambatan	Usulan Perbaikan
				K	D		Realisasi Pengendalian	Dokumen Pemantauan	K	D		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ketidaktepatan dalam penyusunan HPS, Spesifikasi Teknis, dan rancangan kontrak	Data dukung kurang	BPKIL Serang	3,25	3,75	- Identifikasi kebutuhan bahan pengujian sampel - Refrensi harga	Melakukan survei harga terkini dan ketersediaan stok barang	Data dukung penyusunan HPS	1	1	Barang import dan indent	Pelaksanaan kegiatan dilakukan di awal tahun
2	Kualitas barang/jasa tidak sesuai dengan spesifikasi teknis/kuantitas pada kontrak	Kurangnya pengawasan PPK	BPKIL Serang	3,50	3,50	Menetapkan tim teknis pengadaan barang dan jasa	Membentuk tim teknis pengadaan barang dan jasa untuk melakukan pemereiksaan barang	SK Tim Teknis	2	1	Barang import, indent, discontinue dan terkendala ijin import	Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada awal tahun dan tidak mengadakan barang yang terkendala ijin import
3	Pemotongan Anggaran	Automatic Adjusment	BPKIL Serang	3,25	3,75	Pengadaan dilaksanakan di T-1	Pelaksanaan tender di awal tahun	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan	2	1	Automatic Adjustment untuk kegiatan prioritas	Pelaksanaan kegiatan dilakukan di awal tahun

Serang, 10 Juli 2025
 Unit Pemilik Risiko
 Kepala Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang



drh. Taha Tusiha

PEMANTAUAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

1. Satuan Kerja : Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang
 2. Kegiatan : Penyidikan dan Pengujian Penyakit
 3. Tujuan Kegiatan : Pemenuhan kebutuhan bahan pengujian sampel Surveilans Resistensi Antimikroba (AMR) /Surveilans Antimicrobial Use (AMU) dan sampel monitoring penyakit ikan air payau yang diuji

No.	Uraian Risiko	Sebab	Pemilik Risiko	Risiko Awal		Rencana Kegiatan Pengendalian	Pemantauan		Sisa Risiko setelah Pemantauan		Hambatan	Usulan Perbaikan
				K	D		Realisasi Pengendalian	Dokumen Pemantauan	K	D		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kesalahan dalam penyusunan HPS, Spesifikasi Teknis, dan rancangan kontrak	Data dukung kurang	BPKIL Serang	2,50	2,50	- Identifikasi kebutuhan bahan pengujian sampel - Refrensi harga	Melaksanakan survey harga pasar dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri terkini	Data dukung penyusunan HPS	1	1	Barang import dan indent	Pelaksanaan kegiatan dilakukan di awal tahun
2	Kualitas barang/jasa tidak sesuai dengan spesifikasi teknis/kuantitas pada kontrak	Kurangnya pengawasan PPK	BPKIL Serang	3,50	3,50	Menetapkan tim teknis pengadaan barang dan jasa	Membentuk tim teknis pengadaan barang dan jasa untuk melakukan pemereiksaan barang	SK Tim Teknis	1	1	Barang import, indent, discontinue dan terkendala ijin import	Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada awal tahun dan tidak mengadakan barang yang terkendala ijin import

Serang, 10 Juli 2025
 Unit Pemilik Risiko,
 Kepala Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang



drh. Tona Tusihadi

PEMANTAUAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

1. Satuan Kerja : Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang
2. Kegiatan : Peralatan Laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan
3. Tujuan Kegiatan : Pemenuhan kegiatan penunjang untuk kegiatan IISAP

No.	Uraian Risiko	Sebab	Pemilik Risiko	Risiko Awal		Rencana Kegiatan Pengendalian	Pemantauan		Sisa Risiko setelah Pemantauan		Hambatan	Usulan Perbaikan
				K	D		Realisasi Pengendalian	Dokumen Pemantauan	K	D		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Keterlambatan kegiatan	Kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan awal	BPKIL Serang	3,50	3,00	Revisi RKAKL	Revisi RKAKL	RKAL	2	1	Blokir Anggaran karena efisiensi	Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada awal tahun

Serang, 10 Juli 2025
Unit Pemilik Risiko,
Kepala Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang



dr. Taha Tushadi

PEMANTAUAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

1. Satuan Kerja : Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang
 2. Kegiatan : Penyidikan dan Pengujian Penyakit
 3. Tujuan Kegiatan : Pemenuhan kebutuhan bahan pengujian Sampel Residu, Kualitas Air, Patologi, Mikrobiologi, Biologi Molekuler, Nutrisi Pakan, Mutu pakan dan obat Ikan Air tawar

No.	Uraian Risiko	Sebab	Pemilik Risiko	Risiko Awal		Rencana Kegiatan Pengendalian	Pemantauan		Sisa Risiko setelah Pemantauan		Hambatan	Usulan Perbaikan
				K	D		Realisasi Pengendalian	Dokumen Pemantauan	K	D		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kesalahan dalam penyusunan HPS, Spesifikasi Teknis, dan rancangan kontrak	Data dukung kurang	BPKIL Serang	3,25	3,75	- Identifikasi kebutuhan bahan pengujian sampel - Refrensi harga	Melakukan survei harga terkini dan ketersediaan stok barang	Data dukung penyusunan HPS	1	1	Barang import dan indent	Pelaksanaan kegiatan dilakukan di awal tahun
2	Kualitas barang/jasa tidak sesuai dengan spesifikasi teknis/kuantitas pada kontrak	Kurangnya pengawasan PPK	BPKIL Serang	3,50	3,50	Menetapkan tim teknis pengadaan barang dan jasa	Membentuk tim teknis pengadaan barang dan jasa untuk melakukan pemereiksaan barang	SK Tim Teknis	2	2	Barang import, indent, discontinue dan terkendala ijin import	Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada awal tahun dan tidak mengadakan barang yang terkendala ijin import
3	Pemotongan Anggaran	Automatic Adjusment	BPKIL Serang	3,25	3,75	Pengadaan dilaksanakan di T-1	Pelaksanaan tender di awal tahun	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan	2	2	Automatic Adjustment untuk kegiatan prioritas	Pelaksanaan kegiatan dilakukan di awal tahun

Serang, 10 Juli 2025
 Unit Pemilik Risiko
 Kepala Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang



drh. Taha Tusiha

PEMANTAUAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

1. Satuan Kerja : Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang
 2. Kegiatan : Penyidikan dan Pengujian Penyakit
 3. Tujuan Kegiatan : Pemenuhan kebutuhan bahan pengujian Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba (AMR) /Surveilans Antimicrobial Use (AMU) dan sampel monitoring penyakit ikan air tawar yang diuji

No.	Uraian Risiko	Sebab	Pemilik Risiko	Risiko Awal		Rencana Kegiatan Pengendalian	Pemantauan		Sisa Risiko setelah Pemantauan		Hambatan	Usulan Perbaikan
				K	D		Realisasi Pengendalian	Dokumen Pemantauan	K	D		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kesalahan dalam penyusunan HPS, Spesifikasi Teknis, dan rancangan kontrak	Data dukung kurang	BPKIL Serang	3,75	3,50	- Identifikasi kebutuhan bahan pengujian sampel - Refrensi harga	Melakukan survei harga terkini dan ketersediaan stok barang	Data dukung penyusunan HPS	2	1	Barang import dan indent	Pelaksanaan kegiatan dilakukan di awal tahun
2	Kualitas barang/jasa tidak sesuai dengan spesifikasi teknis/kuantitas pada kontrak	Kurangnya pengawasan PPK	BPKIL Serang	3,25	3,25	Menetapkan tim teknis pengadaan barang dan jasa	Membentuk tim teknis pengadaan barang dan jasa untuk melakukan pemeriksaan barang	SK Tim Teknis	2	2	Barang import, indent, discontinue dan terkendala ijin import	Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada awal tahun dan tidak mengadakan barang yang terkendala ijin import

Serang, 10 Juli 2025
 Unit Pemilik Risiko
 Kepala Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang



drh. Tona Lusiana

PEMANTAUAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

1. Satuan Kerja : Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang
2. Kegiatan : Diseminasi Teknis Perikanan Budidaya/ Temu Lapang
3. Tujuan Kegiatan : Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan Pembudidaya Ikan

No.	Uraian Risiko	Sebab	Pemilik Risiko	Risiko Awal		Rencana Kegiatan Pengendalian	Pemantauan		Sisa Risiko setelah Pemantauan		Hambatan	Usulan Perbaikan
				K	D		Realisasi Pengendalian	Dokumen Pemantauan	K	D		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah peserta bimtek yang hadir tidak 100%	kurangnya koordinasi dengan dinas	BPKIL Serang	3,50	3,25	Melakukan koordinasi dengan dinas	Melakukan koordinasi dengan dinas	Surat undangan	2	1	<i>Automatic Adjustment</i> untuk kegiatan prioritas	Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada awal tahun

Serang, 10 Juli 2025
Unit Pemilik Risiko
Kepala Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang



dm. Toha Tushadi

PEMANTAUAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

1. Satuan Kerja : Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang
 2. Kegiatan : Penyidikan dan Pengujian Penyakit
 3. Tujuan Kegiatan : Pemenuhan kebutuhan bahan pengujian Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Laut yang diuji

No.	Uraian Risiko	Sebab	Pemilik Risiko	Risiko Awal		Rencana Kegiatan Pengendalian	Pemantauan		Sisa Risiko setelah Pemantauan		Hambatan	Usulan Perbaikan
				K	D		Realisasi Pengendalian	Dokumen Pemantauan	K	D		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kesalahan dalam penyusunan HPS, Spesifikasi Teknis, dan rancangan kontrak	Data dukung kurang	BPKIL Serang	3,25	3,75	- Identifikasi kebutuhan bahan pengujian sampel - Refrensi harga	Melakukan survei harga terkini dan ketersediaan stok barang	Data dukung penyusunan HPS	1	1	Barang import dan indent	Pelaksanaan kegiatan dilakukan di awal tahun
2	Kualitas barang/jasa tidak sesuai dengan spesifikasi teknis/kuantitas pada kontrak	Kurangnya pengawasan PPK	BPKIL Serang	3,50	3,50	Menetapkan tim teknis pengadaan barang dan jasa	Membentuk tim teknis pengadaan barang dan jasa untuk melakukan pemereiksaan barang	SK Tim Teknis	1	1	Barang import, indent, discontinue dan terkendala ijin import	Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada awal tahun dan tidak mengadakan barang yang terkendala ijin import
3	Pemotongan Anggaran	Automatic Adjusment	BPKIL Serang	3,25	3,75	Pengadaan dilaksanakan di bulan Januari	Pelaksanaan tender di awal tahun	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan	1	1	Automatic Adjustment untuk kegiatan prioritas	Pelaksanaan kegiatan dilakukan di awal tahun

Serang, 10 Juli 2025
 Unit Pemilik Risiko
 Kepala Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang



drh. Tona Tusiha

MANAJEMEN RISIKO KKN

Unit Kerja : Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang
 Kegiatan/Layanan Utama : Melaksanakan pengujian hama dan penyakit ikan, obat ikan, residu, pakan ikan, dan lingkungan perikanan budidaya
 Tujuan : Untuk mengetahui potensi terjadinya KKN dan posisi strategis Pegawai ASN dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKIL Serang
 Tahun : 2025

No	Proses Bisnis	Posisi Kunci	Risiko	Probabilitas	Dampak	Status Risiko	Rencana Kegiatan Pengendalian	Waktu	Pemantauan Kegiatan Pengendalian	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Proses konsultasi dokumen teknis obat ikan	Tim klarifikasi, Kepala Balai, PUL, Arsiparis	Suap dan gratifikasi untuk meloloskan dokumen yang tidak sesuai, penyalahgunaan jabatan	4	4	16	Sosialisasi ZI dan gratifikasi serta penandatanganan surat pernyataan mendukung ZI dan anti gratifikasi	Januari - Desember	Semester I dan II	Kepala Balai
							Internalisasi tentang korupsi dan integritas serta tata cara penolakan gratifikasi	Januari - Desember	Semester I dan II	
							Pelaporan LHKPN/ LHKASN	Januari - Maret	Semester I dan II	
							verifikasi berjenjang oleh tim verifikasi dan kepala balai melalui fitur Verifikasi Layanan pada aplikasi Smart Prima	Januari - Desember	Semester I dan II	
							Pemasangan CCTV di ruang konsultasi	Januari - Desember	Semester I dan II	
2	Pengujian kelayakan mutu, khasiat, dan keamanan obat ikan	Penata Usaha Laboratorium, Manajer Teknis, Analis, Penyelia, Kepala Balai	Suap dan gratifikasi untuk meloloskan hasil uji mutu yang tidak memenuhi syarat, penyalahgunaan jabatan	4	4	16	Sosialisasi ZI dan gratifikasi serta penandatanganan surat pernyataan mendukung ZI dan anti gratifikasi	Januari - Desember	Semester I dan II	Kepala Balai
							Survei persepsi anti korupsi saat Bimtek, sosialisasi standar pelayanan melalui google form	Januari - Desember	Semester I dan II	
							Pelaporan LHKPN/ LHKASN	Januari - Maret	Semester I dan II	
							kodefikasi sampel	Januari - Desember	Semester I dan II	
							verifikasi berjenjang oleh analis, penyelia dan manajer teknis	Januari - Desember	Semester I dan II	
							Pemasangan CCTV di ruang konsultasi	Januari - Desember	Semester I dan II	

No	Proses Bisnis	Posisi Kunci	Risiko	Probabilitas	Dampak	Status Risiko	Rencana Kegiatan Pengendalian	Waktu	Pemantauan Kegiatan Pengendalian	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Pelaksanaan surveilan, monitoring, deteksi dini, penanganan penyakit ikan dan pembinaan obat ikan	Tim Monitoring	Gratifikasi oleh perusahaan dan pembudidaya kepada tim monitoring BPKIL Serang	4	4	16	Pencantumkan larangan pemberian gratifikasi pada surat tugas Internalisasi tentang korupsi dan integritas serta tata cara penolakan Survei persepsi anti korupsi melalui google form Sosialisasi ZI dan gratifikasi serta penandatanganan surat pernyataan mendukung ZI dan anti gratifikasi	Januari - Desember Januari - Desember Januari - Desember Januari - Desember	Semester I dan II Semester I dan II Semester I dan II Semester I dan II	Kepala Balai
4	Pelaksanaan Auditor CPOIB, CPIB, CBIB	Auditor	Suap dan gratifikasi	3	3	9	Pencantumkan larangan pemberian gratifikasi pada surat tugas Internalisasi tentang korupsi dan integritas serta tata cara penolakan Suvei persepsi anti korupsi melalui google form	Januari - Desember Januari - Desember Januari - Desember	Semester I dan II Semester I dan II Semester I dan II	Auditor
5	Pengadaan barang dan jasa	PPK, Tim penyusun HPS, Tim teknis (pengelolaan kontrak), Pejabat pengadaan	Gratifikasi, penyalahgunaan jabatan	4	4	16	Internalisasi tentang korupsi dan integritas serta tata cara penolakan Pencantumkan larangan pemberian gratifikasi pada Surat pesanan dan Survei persepsi anti korupsi melalui google form Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan oleh tim teknis (pengelolaan	Januari - Desember Januari - Desember Januari - Desember Januari - Desember	Semester I dan II Semester I dan II Semester I dan II Semester I dan II	PPK

STATUS RISIKO

Deskripsi	Level	Level Dimulai Dari Status
Sangat Tinggi	5	Lebih dari 15 (lima belas)
Tinggi	4	Lebih dari 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas)
Sedang	3	Lebih dari 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh)
Rendah	2	Lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima)
Sangat Rendah	1	1 (satu) sampai dengan 3 (tiga)

Serang, 02 Januari 2025
Kepala Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang



Zeta Tusihadi



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN
LINGKUNGAN SERANG**

JALAN RAYA CARITA DESA UMBUL TANJUNG KEC. CINANGKA
PO.BOX 123 ANYER LOR, SERANG 42167 TELP/FAX: (0254) 650431
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bpkilserang@kkp.go.id

Nomor : B.1476/BPKIL/TU.140/VII/2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 Laporan
Hal : Laporan SPIP TW II TA 2025 BPKIL Serang

15 Juli 2025

Yth. Sekretaris Ditjen Perikanan Budi Daya
di Jakarta

Menindaklanjuti surat Sekretaris Ditjen Perikanan Budi Daya nomor. B.4165/DJPB.1/TU.130/VII/2025 tanggal 8 Juli 2025 Perihal Permintaan Laporan SPIP TW II TA 2025, bersama ini kami sampaikan Laporan SPIP Semester I TA 2025 Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Balai Pengujian Kesehatan
Ikan dan Lingkungan Serang,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Toha Tusihadi